

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses layanan energi modern sangat penting untuk mencapai kebutuhan sosial dasar dengan mempromosikan pembangunan ekonomi. Layanan energi modern, khususnya listrik dan gas, berdampak pada produktivitas, kesehatan, pendidikan, air bersih dan layanan komunikasi (*International Energy Agency*, 2014). Energi per kapita dan konsumsi listrik sangat berkorelasi dengan perkembangan ekonomi dan indikator gaya hidup modern lainnya, dengan anggapan bahwa konsumsi listrik terkait dengan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik (Starr, 1972). Laporan bahwa esensi energi, serta penekanan pada aksesibilitas energi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan pendapatan (Poloamina *et al.*, 2013). Banyak penelitian telah meneliti bagaimana akses ke energi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Adam *et al.*, 2018; Shahbaz *et al.*, 2013), tetapi tidak banyak penelitian empiris telah dilakukan untuk memvalidasi manfaat lain dalam hal pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Kanagawa *et al.*, 2008).

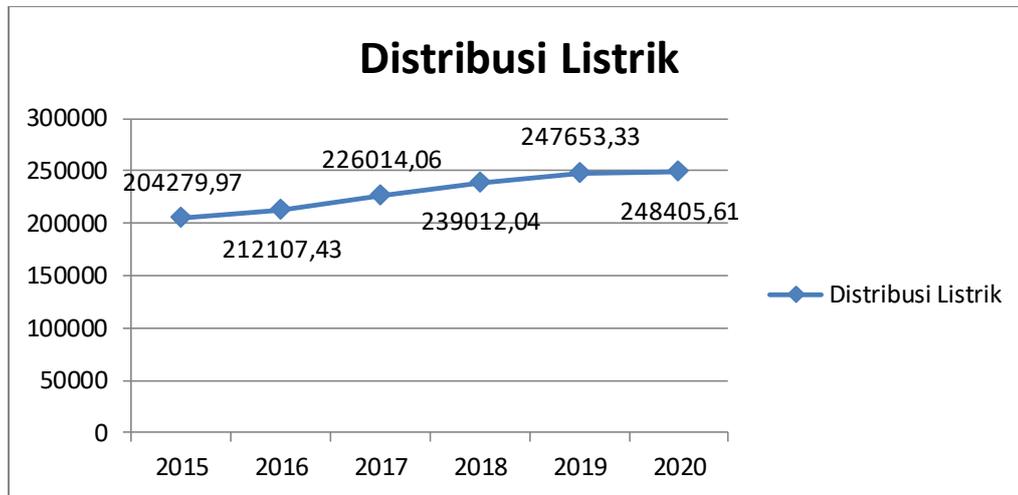
Perspektif kebijakan, selalu penting untuk memastikan pihak-pihak yang diuntungkan atau dirugikan dari perbaikan akses energi. Ini konsisten dengan literatur keadilan energi, yang menyerukan distribusi manfaat dan kerugian dari layanan energi di semua anggota masyarakat tanpa memandang pendapatan, lokasi, dan ras. Maka oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kasus di Indonesia tentang pengaruh akses listrik terhadap ketimpangan pendapatan karena dampak distribusi listrik penting karena ketimpangan

dianggap sebagai ancaman korosif sosial terhadap kesejahteraan masyarakat (Wilkinson *et al.*, 2010). Efek distribusi listrik adalah kepentingan politik yang besar dan telah ditampilkan dalam banyak diskusi publik di seluruh dunia karena perbedaan sosial yang berkembang (Sen, 1997; Stiglitz *et al.*, 2009). Kesenjangan, seperti halnya keadilan, merupakan nilai penting di sebagian besar masyarakat, yang dapat menjadi sinyal kurangnya mobilitas dan peluang pendapatan (Dabla-Norris *et al.*, 2015).

Dampak potensial dari akses energi atau listrik terhadap ketimpangan pendapatan, pembangunan manusia dan kualitas hidup telah menarik beberapa studi empiris. Dilaporkan bahwa konsumsi listrik berkorelasi positif dengan indeks pembangunan manusia (Kanagawa & Nakata, 2008). Negara dengan tingkat konsumsi listrik yang lebih tinggi menempati peringkat tinggi dalam kegiatan ekonomi serta dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Niu *et al.*, 2013) dan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang (Mazuro, 2011). Konsumsi listrik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan setelah terpenuhi, peningkatan konsumsi listrik dapat menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang sesuai (Niu *et al.*, 2016).

Berdasarkan data BPS Indonesia (2021) bahwa listrik yang didistribusikan Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 listrik didistribusikan sebesar 204.279,97 GWh, pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 212.107,43 GWh, pada tahun 2017 listrik yang didistribusikan sebesar 226.014,06 GWh, pada tahun 2018 sebesar 239.012,04 GWh, pada tahun 2019 juga meningkat menjadi sebesar 247.653,33

GWh dan kemudian pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan terhadap listrik yang distribusikan menjadi sebesar 248.405,61 GWh.



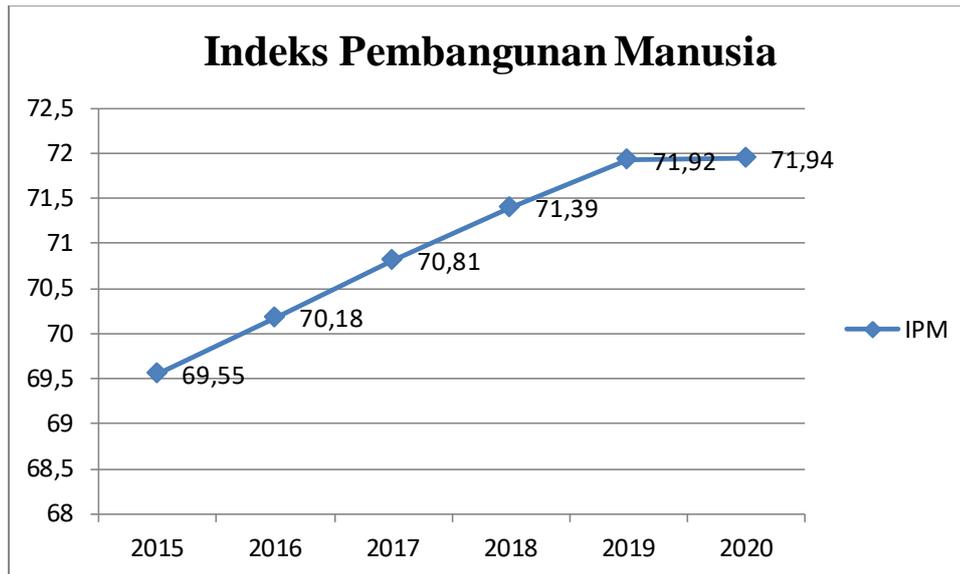
Gambar 1.1 Distribusi Listrik Indonesia Tahun 2015-2020

Peningkatan distribusi listrik diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Pembangunan manusia Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagaimana dirumuskan sebagai proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, pendapatan dan pekerjaan. Salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk melihat pembangunan sumber daya manusia yang mampu membawa pada kondisi keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) (Iskandar, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki

pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir dan mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2020). Semakin tinggi angka indeks ini, maka dapat dikatakan bahwa masyarakatnya semakin sejahtera dan sebaliknya bila angka indeks rendah maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah. (Zainuddin, 2015).

Sejak tahun 1990 perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia di teliti dan laporannya di terbitkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Berdasarkan data BPS Indonesia (2021) menginformasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan berdasarkan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia metode lama maupun metode baru. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebesar 69,55, meningkat menjadi 70,18 pada tahun 2016, pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebesar 70,81, pada tahun 2018-2019 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masing-masing sebesar 71,39, 71,92 dan pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,94.



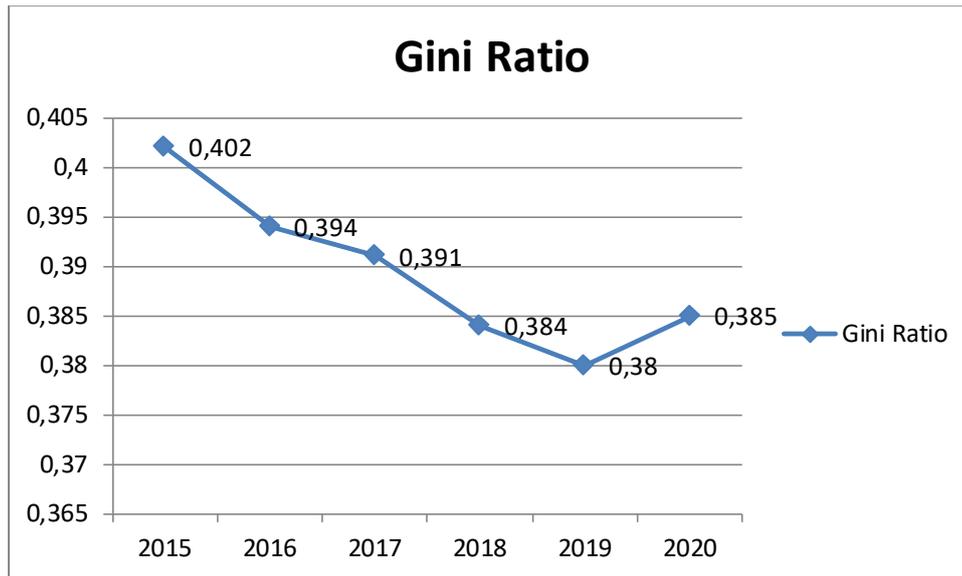
Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2015-2020

Indeks Pembangunan Manusia negara Indonesia ternyata masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam. Hal tersebut menunjukkan masih diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia di tengah-tengah persaingan internasional (UNDP, 2020). Upaya peningkatan kemampuan dasar penduduk dapat dilakukan dengan peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting agar kegiatan ekonomi penduduk di dalam suatu daerah dan negara berjalan secara produktif. Efektivitas dalam menaikkan Indeks Pembangunan Manusia merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dkk, 2014). Agar pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan manusia adalah

ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan kesenjangan. Agar ketimpangan dan perkembangan antar suatu daerah dengan daerah lain tidak menciptakan jurang yang semakin lebar, maka implikasi kebijaksanaan terhadap daur perkembangan dari pembangunan haruslah di rumuskan secara tepat. Ketimpangan disebabkan secara alami karena proses pembangunan yang sedikit, dan ketidakseimbangan kebijakan, seperti investasi pemerintah yakni dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah (Noegroho dkk, 2007). Pembangunan manusia perlu dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah/ kota.

Indeks gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Berdasarkan data BPS Indonesia (2020) bahwa gini ratio mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2015 gini ratio sebesar 0,402, pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 0,394, pada tahun 2017 gini ratio sebesar 0,391, pada tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 0,384, 0,380 dan kemudian pada tahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 0,385.



Gambar 1.3 Gini Ratio Indonesia Tahun 2015-2020

Energi listrik di Indonesia dikelola dan dibangkitkan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah diberikan hak khusus oleh pemerintah, untuk memonopoli pasar energi listrik. Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam industri tersebut, khususnya pada penetapan tarif dan jumlah tenaga listrik yang harus diproduksi. Industri yang memiliki hak monopoli seperti ini harus diatur secara ketat oleh pemerintah karena terkait langsung dengan kesejahteraan penduduk (*society welfare*). Sebagaimana diketahui fungsi dari PLN adalah untuk membangkitkan, menyalurkan dan menyediakan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan tenaga listrik harus seimbang dengan jumlah yang dibutuhkan. Tenaga listrik yang berlebih mengakibatkan kapasitas terpasang yang ada tidak termanfaatkan, sehingga biaya menjadi semakin tinggi. Sebaliknya kekurangan persediaan listrik akan menyebabkan pemadaman, bila pemadaman yang terjadi tidak menentu atau berkepanjangan akan menghambat aktifitas perekonomian bahkan mungkin terjadi kerawanan sosial (Syahlan *et al.*, 2016).

Salah satu hasil studi William Easterly (2006) mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (*inequality*) yang tinggi merupakan penghambat dari kemakmuran, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi akibat adanya distribusi pendapatan yang kurang merata di sejumlah wilayah di suatu negara termasuk negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Analisis Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Akses Listrik di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap akses listrik di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui akses listrik di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.
2. Menjelaskan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap akses listrik di Indonesia.
3. Menjelaskan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui akses listrik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui akses listrik di Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai indeks pembangunan manusia, akses listrik dan ketimpangan pendapatan.
3. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai indeks pembangunan manusia, akses listrik dan ketimpangan pendapatan.
4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai analisis ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui akses listrik di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi waktu penelitian (*times series*) yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan daerah penelitian yaitu terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia. Variabel bebas yang diteliti adalah ketimpangan pendapatan dan akses listrik sebagai variabel mediasi, sedangkan variabel terikatnya adalah indeks pembangunan manusia di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dari masing-masing bab yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang terkait dengan ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui akses listrik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH DAN PERKEMBANGAN VARIABEL PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Indonesia.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan untuk penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak yang berkepentingan

